



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/PMK.07/2019

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH
PERUBAHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103A Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019 dan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Pusat dapat melakukan pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian

pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

- c. bahwa bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 3. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran adalah DAU tambahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pemberian bantuan pembayaran atas selisih perubahan Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran yang selanjutnya disingkat DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran merupakan dana yang bersumber dari hasil pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dalam rangka pembayaran selisih perubahan Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran TKDD.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;
- b. penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;

- c. pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; dan
- d. penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan.

BAB II

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHAN IURAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan atas Selisih Perubahan Iuran dialokasikan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebesar Rp3.342.404.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta rupiah); dan
 - b. cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar Rp157.596.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).
- (4) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memperhitungkan jumlah selisih perubahan Iuran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per peserta per bulan berdasarkan jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- (2) Jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data kepesertaan aktif penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per tanggal 1 Agustus 2019 dari BPJS Kesehatan.
- (3) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH
PERUBAHAN IURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dilaksanakan secara sekaligus sebesar pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, paling cepat minggu ketiga bulan November 2019.
- (2) Penyaluran cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Desember 2019.

Pasal 6

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun revisi DIPA Satuan Kerja Transfer Dana Perimbangan (999201) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) berdasarkan alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan revisi DIPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan DIPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan *output* kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terhadap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan dalam rangka pembayaran selisih perubahan Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN ATAS PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHAN IURAN DAN PENYETORAN DHP DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHAN IURAN

Pasal 8

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan oleh Direktur Dana Perimbangan selaku KPA BUN Transfer Dana Perimbangan.

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih perubahan Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. *specimen* tanda tangan pejabat yang menyampaikan permintaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
 - c. kuitansi penerimaan pembayaran selisih perubahan Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan:
 - a. pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; dan
 - b. penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM yang sama dengan SPP dan SPM penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebesar penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada masing-masing Daerah.
- (3) Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan pencatatan DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) PPK melaksanakan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM menerbitkan SPM untuk penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (6) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN CADANGAN PERUBAHAN JUMLAH
KEPESERTAAN

Pasal 13

- (1) BPJS Kesehatan menyampaikan data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 4 Desember 2019.

- (2) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPJS Kesehatan melakukan pembahasan penghitungan alokasi untuk selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran per Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per Daerah per bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019;
 - b. jumlah kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan Iurannya melalui penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; dan
 - c. jumlah selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran.
- (5) Jumlah selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibayarkan dari cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b secara proporsional.
- (6) Perubahan jumlah kepesertaan setelah penyerahan data kepesertaan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran yang melebihi cadangan perubahan jumlah kepesertaan, dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
 - b. kuitansi penerimaan pembayaran selisih perubahan Iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
 - a. penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;
 - b. penyaluran alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;
 - c. pemotongan atas penyaluran alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran;

- d. penyetoran DHP alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan; dan/atau
 - e. penyetoran selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Alokasi dan penyaluran alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, memperhitungkan selisih lebih penyetoran atas DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c.
 - (4) Penyaluran alokasi selisih kurang, pemotongan atas penyaluran, dan penyetoran DHP atas alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.
 - (5) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12.
 - (6) Penyaluran alokasi selisih kurang, pemotongan atas penyaluran, dan penyetoran DHP atas alokasi selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Desember 2019.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah memperhitungkan selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masih terdapat selisih lebih, BPJS Kesehatan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara sebesar selisih lebih tersebut

- melalui bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2019.
- (2) Penyetoran selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pengembalian TKDD.
 - (3) Tata cara penyetoran selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan atas penyaluran dan pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran atau selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, serta penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran.
- (2) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mengubah peraturan kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu atas:
 - a. data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per Daerah per bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019;
 - b. data kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan Iurannya melalui penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; dan
 - c. data selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan.
- (3) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyampaikan permintaan penyetoran kembali lebih bayar ke Rekening Kas Umum Negara kepada BPJS Kesehatan.

- (4) Penyetoran kembali selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

Dalam hal struktur dan/atau nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran kepada BPJS Kesehatan, serta penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. format permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1);
 - b. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan kuitansi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2); dan
 - c. format penyampaian data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1430

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/PMK.07/2019

TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

**ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHAN IURAN PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

No	Nama Daerah	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Total DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran
I	Provinsi Aceh	2,059,437	195,646,515,000.00
1	Kab. Aceh Barat	-	-
2	Kab. Aceh Besar	-	-
3	Kab. Aceh Selatan	-	-
4	Kab. Aceh Singkil	-	-
5	Kab. Aceh Tengah	-	-
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-
7	Kab. Aceh Timur	-	-
8	Kab. Aceh Utara	-	-
9	Kab. Bireuen	-	-
10	Kab. Pidie	-	-
11	Kab. Simeulue	-	-
12	Kota Banda Aceh	-	-
13	Kota Sabang	-	-
14	Kota Langsa	-	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-
16	Kab. Gayo Lues	-	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	-
18	Kab. Aceh Jaya	-	-
19	Kab. Nagan Raya	-	-
20	Kab. Aceh Tamiang	-	-
21	Kab. Bener Meriah	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	-	-
23	Kota Subulussalam	-	-
II	Provinsi Sumatera Utara	429,764	40,827,580,000.00
1	Kab. Asahan	10,000	950,000,000.00
2	Kab. Dairi	29,947	2,844,965,000.00
3	Kab. Deli Serdang	125,652	11,936,940,000.00
4	Kab. Karo	8,047	764,465,000.00
5	Kab. Labuhanbatu	10,000	950,000,000.00
6	Kab. Langkat	31,984	3,038,480,000.00
7	Kab. Mandailing Natal	8,445	802,275,000.00
8	Kab. Nias	23,107	2,195,165,000.00
9	Kab. Simalungun	85,059	8,080,605,000.00

10	Kab. Tapanuli Selatan	30,200	2,869,000,000.00
11	Kab. Tapanuli Tengah	24,541	2,331,395,000.00
12	Kab. Tapanuli Utara	29,829	2,833,755,000.00
13	Kab. Toba Samosir	6,970	662,150,000.00
14	Kota Binjai	17,985	1,708,575,000.00
15	Kota Medan	323,577	30,739,815,000.00
16	Kota Pematang Siantar	12,117	1,151,115,000.00
17	Kota Sibolga	39,167	3,720,865,000.00
18	Kota Tanjung Balai	44,527	4,230,065,000.00
19	Kota Tebing Tinggi	33,772	3,208,340,000.00
20	Kota Padang Sidempuan	8,930	848,350,000.00
21	Kab. Pakpak Bharat	17,997	1,709,715,000.00
22	Kab. Nias Selatan	9,875	938,125,000.00
23	Kab. Humbang Hasundutan	16,240	1,542,800,000.00
24	Kab. Serdang Bedagai	42,642	4,050,990,000.00
25	Kab. Samosir	6,516	619,020,000.00
26	Kab. Batu Bara	19,539	1,856,205,000.00
27	Kab. Padang Lawas	5,641	535,895,000.00
28	Kab. Padang Lawas Utara	10,836	1,029,420,000.00
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	19,162	1,820,390,000.00
30	Kab. Labuhanbatu Utara	10,263	974,985,000.00
31	Kab. Nias Utara	5,125	486,875,000.00
32	Kab. Nias Barat	9,458	898,510,000.00
33	Kota Gunungsitoli	13,014	1,236,330,000.00
III	Provinsi Sumatera Barat	290	27,550,000.00
1	Kab. Limapuluh Kota	20,676	1,964,220,000.00
2	Kab. Agam	105,138	9,988,110,000.00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	36,568	3,473,960,000.00
4	Kab. Padang Pariaman	20,996	1,994,620,000.00
5	Kab. Pasaman	87,370	8,300,150,000.00
6	Kab. Pesisir Selatan	29,273	2,780,935,000.00
7	Kab. Sijunjung	17,105	1,624,975,000.00
8	Kab. Solok	26,047	2,474,465,000.00
9	Kab. Tanah Datar	62,103	5,899,785,000.00
10	Kota Bukit Tinggi	9,107	865,165,000.00
11	Kota Padang Panjang	17,337	1,647,015,000.00
12	Kota Padang	76,557	7,272,915,000.00
13	Kota Payakumbuh	43,653	4,147,035,000.00
14	Kota Sawahlunto	31,369	2,980,055,000.00
15	Kota Solok	24,569	2,334,055,000.00
16	Kota Pariaman	16,672	1,583,840,000.00
17	Kab. Pasaman Barat	35,464	3,369,080,000.00
18	Kab. Dharmasraya	24,074	2,287,030,000.00
19	Kab. Solok Selatan	45,485	4,321,075,000.00
IV	Provinsi Riau	-	-
1	Kab. Bengkalis	54,592	5,186,240,000.00
2	Kab. Indragiri Hilir	143,884	13,668,980,000.00
3	Kab. Indragiri Hulu	71,272	6,770,840,000.00
4	Kab. Kampar	34,918	3,317,210,000.00
5	Kab. Kuantan Singingi	43,999	4,179,905,000.00
6	Kab. Pelalawan	14,172	1,346,340,000.00
7	Kab. Rokan Hilir	9,832	934,040,000.00

8	Kab. Rokan Hulu	24,259	2,304,605,000.00
9	Kab. Siak	24,451	2,322,845,000.00
10	Kota Dumai	84,323	8,010,685,000.00
11	Kota Pekanbaru	41,802	3,971,190,000.00
12	Kab. Kepulauan Meranti	46,807	4,446,665,000.00
V	Provinsi Jambi	75,983	7,218,385,000.00
1	Kab. Batang Hari	47,610	4,522,950,000.00
2	Kab. Bungo	16,169	1,536,055,000.00
3	Kab. Kerinci	12,956	1,230,820,000.00
4	Kab. Merangin	15,195	1,443,525,000.00
5	Kab. Muaro Jambi	18,842	1,789,990,000.00
6	Kab. Sarolangun	8,870	842,650,000.00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	10,598	1,006,810,000.00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	8,456	803,320,000.00
9	Kab. Tebo	9,741	925,395,000.00
10	Kota Jambi	21,091	2,003,645,000.00
11	Kota Sungai Penuh	48,045	4,564,275,000.00
VI	Provinsi Sumatera Selatan	219,187	20,822,765,000.00
1	Kab. Lahat	177,881	16,898,695,000.00
2	Kab. Musi Banyuasin	190,626	18,109,470,000.00
3	Kab. Musi Rawas	21,333	2,026,635,000.00
4	Kab. Muara Enim	177,010	16,815,950,000.00
5	Kab. Ogan Komering Ilir	50,880	4,833,600,000.00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	10,000	950,000,000.00
7	Kota Palembang	63,161	6,000,295,000.00
8	Kota Prabumulih	8,344	792,680,000.00
9	Kota Pagar Alam	6,062	575,890,000.00
10	Kota Lubuk Linggau	20,088	1,908,360,000.00
11	Kab. Banyuasin	40,419	3,839,805,000.00
12	Kab. Ogan Ilir	17,847	1,695,465,000.00
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	16,362	1,554,390,000.00
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	18,115	1,720,925,000.00
15	Kab. Empat Lawang	22,560	2,143,200,000.00
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	88,546	8,411,870,000.00
17	Kab. Musi Rawas Utara	12,631	1,199,945,000.00
VII	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	42,329	4,021,255,000.00
2	Kab. Bengkulu Utara	5,370	510,150,000.00
3	Kab. Rejang Lebong	25,378	2,410,910,000.00
4	Kota Bengkulu	3,910	371,450,000.00
5	Kab. Kaur	6,293	597,835,000.00
6	Kab. Seluma	11,727	1,114,065,000.00
7	Kab. Mukomuko	5,567	528,865,000.00
8	Kab. Lebong	31,089	2,953,455,000.00
9	Kab. Kepahiang	14,472	1,374,840,000.00
10	Kab. Bengkulu Tengah	7,795	740,525,000.00
VIII	Provinsi Lampung	212,610	20,197,950,000.00
1	Kab. Lampung Barat	23,347	2,217,965,000.00
2	Kab. Lampung Selatan	80,215	7,620,425,000.00
3	Kab. Lampung Tengah	36,676	3,484,220,000.00
4	Kab. Lampung Utara	43,568	4,138,960,000.00
5	Kab. Lampung Timur	17,406	1,653,570,000.00

6	Kab. Tanggamus	43,973	4,177,435,000.00
7	Kab. Tulang Bawang	28,331	2,691,445,000.00
8	Kab. Way Kanan	30,222	2,871,090,000.00
9	Kota Bandar Lampung	46,483	4,415,885,000.00
10	Kota Metro	16,544	1,571,680,000.00
11	Kab. Pesawaran	30,347	2,882,965,000.00
12	Kab. Pringsewu	33,623	3,194,185,000.00
13	Kab. Mesuji	36,364	3,454,580,000.00
14	Kab. Tulang Bawang Barat	11,389	1,081,955,000.00
15	Kab. Pesisir Barat	21,769	2,068,055,000.00
IX	Provinsi DKI Jakarta	5,084,926	483,067,970,000.00
X	Provinsi Jawa Barat	-	-
1	Kab. Bandung	105,359	10,009,105,000.00
2	Kab. Bekasi	466,035	44,273,325,000.00
3	Kab. Bogor	571,312	54,274,640,000.00
4	Kab. Ciamis	39,341	3,737,395,000.00
5	Kab. Cianjur	156,228	14,841,660,000.00
6	Kab. Cirebon	298,219	28,330,805,000.00
7	Kab. Garut	63,537	6,036,015,000.00
8	Kab. Indramayu	164,831	15,658,945,000.00
9	Kab. Karawang	98,197	9,328,715,000.00
10	Kab. Kuningan	41,804	3,971,380,000.00
11	Kab. Majalengka	67,510	6,413,450,000.00
12	Kab. Purwakarta	53,173	5,051,435,000.00
13	Kab. Subang	54,978	5,222,910,000.00
14	Kab. Sukabumi	213,552	20,287,440,000.00
15	Kab. Sumedang	73,468	6,979,460,000.00
16	Kab. Tasikmalaya	92,817	8,817,615,000.00
17	Kota Bandung	522,748	49,661,060,000.00
18	Kota Bekasi	117,601	11,172,095,000.00
19	Kota Bogor	182,620	17,348,900,000.00
20	Kota Cirebon	77,010	7,315,950,000.00
21	Kota Depok	180,326	17,130,970,000.00
22	Kota Sukabumi	46,099	4,379,405,000.00
23	Kota Tasikmalaya	59,367	5,639,865,000.00
24	Kota Cimahi	28,152	2,674,440,000.00
25	Kota Banjar	32,031	3,042,945,000.00
26	Kab. Bandung Barat	53,933	5,123,635,000.00
27	Kab. Pangandaran	71,501	6,792,595,000.00
XI	Provinsi Jawa Tengah	861,889	81,879,455,000.00
1	Kab. Banjarnegara	51,188	4,862,860,000.00
2	Kab. Banyumas	49,752	4,726,440,000.00
3	Kab. Batang	22,601	2,147,095,000.00
4	Kab. Blora	54,476	5,175,220,000.00
5	Kab. Boyolali	46,991	4,464,145,000.00
6	Kab. Brebes	16,037	1,523,515,000.00
7	Kab. Cilacap	81,036	7,698,420,000.00
8	Kab. Demak	62,709	5,957,355,000.00
9	Kab. Grobogan	74,884	7,113,980,000.00
10	Kab. Jepara	84,150	7,994,250,000.00
11	Kab. Karanganyar	55,178	5,241,910,000.00
12	Kab. Kebumen	57,687	5,480,265,000.00

13	Kab. Kendal	37,346	3,547,870,000.00
14	Kab. Klaten	54,424	5,170,280,000.00
15	Kab. Kudus	174,755	16,601,725,000.00
16	Kab. Magelang	66,997	6,364,715,000.00
17	Kab. Pati	78,872	7,492,840,000.00
18	Kab. Pekalongan	73,290	6,962,550,000.00
19	Kab. Pemasang	18,520	1,759,400,000.00
20	Kab. Purbalingga	48,502	4,607,690,000.00
21	Kab. Purworejo	25,739	2,445,205,000.00
22	Kab. Rembang	42,359	4,024,105,000.00
23	Kab. Semarang	81,854	7,776,130,000.00
24	Kab. Sragen	57,278	5,441,410,000.00
25	Kab. Sukoharjo	75,207	7,144,665,000.00
26	Kab. Tegal	53,181	5,052,195,000.00
27	Kab. Temanggung	54,629	5,189,755,000.00
28	Kab. Wonogiri	64,891	6,164,645,000.00
29	Kab. Wonosobo	41,849	3,975,655,000.00
30	Kota Magelang	21,403	2,033,285,000.00
31	Kota Pekalongan	47,312	4,494,640,000.00
32	Kota Salatiga	28,995	2,754,525,000.00
33	Kota Semarang	302,765	28,762,675,000.00
34	Kota Surakarta	135,865	12,907,175,000.00
35	Kota Tegal	32,535	3,090,825,000.00
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	-
1	Kab. Bantul	60,785	5,774,575,000.00
2	Kab. Gunung Kidul	157,449	14,957,655,000.00
3	Kab. Kulon Progo	54,935	5,218,825,000.00
4	Kab. Sleman	103,579	9,840,005,000.00
5	Kota Yogyakarta	81,256	7,719,320,000.00
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	-
1	Kab. Bangkalan	134,689	12,795,455,000.00
2	Kab. Banyuwangi	4,391	417,145,000.00
3	Kab. Blitar	52,557	4,992,915,000.00
4	Kab. Bojonegoro	94,131	8,942,445,000.00
5	Kab. Bondowoso	29,263	2,779,985,000.00
6	Kab. Gresik	72,078	6,847,410,000.00
7	Kab. Jember	183,630	17,444,850,000.00
8	Kab. Jombang	41,435	3,936,325,000.00
9	Kab. Kediri	16,503	1,567,785,000.00
10	Kab. Lamongan	69,392	6,592,240,000.00
11	Kab. Lumajang	63,948	6,075,060,000.00
12	Kab. Madiun	41,760	3,967,200,000.00
13	Kab. Magetan	42,918	4,077,210,000.00
14	Kab. Malang	130,919	12,437,305,000.00
15	Kab. Mojokerto	42,116	4,001,020,000.00
16	Kab. Nganjuk	21,207	2,014,665,000.00
17	Kab. Ngawi	34,132	3,242,540,000.00
18	Kab. Pacitan	9,964	946,580,000.00
19	Kab. Pamekasan	79,916	7,592,020,000.00
20	Kab. Pasuruan	43,264	4,110,080,000.00
21	Kab. Ponorogo	35,895	3,410,025,000.00
22	Kab. Probolinggo	19,972	1,897,340,000.00

23	Kab. Sampang	43,078	4,092,410,000.00
24	Kab. Sidoarjo	102,444	9,732,180,000.00
25	Kab. Situbondo	14,272	1,355,840,000.00
26	Kab. Sumenep	126,328	12,001,160,000.00
27	Kab. Trenggalek	40,516	3,849,020,000.00
28	Kab. Tuban	26,084	2,477,980,000.00
29	Kab. Tulungagung	17,296	1,643,120,000.00
30	Kota Blitar	26,069	2,476,555,000.00
31	Kota Kediri	34,878	3,313,410,000.00
32	Kota Madiun	77,552	7,367,440,000.00
33	Kota Malang	54,383	5,166,385,000.00
34	Kota Mojokerto	53,501	5,082,595,000.00
35	Kota Pasuruan	65,728	6,244,160,000.00
36	Kota Probolinggo	5,381	511,195,000.00
37	Kota Surabaya	580,881	55,183,695,000.00
38	Kota Batu	10,090	958,550,000.00
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
1	Kab. Bengkayang	22,635	2,150,325,000.00
2	Kab. Landak	10,075	957,125,000.00
3	Kab. Kapuas Hulu	8,578	814,910,000.00
4	Kab. Ketapang	16,753	1,591,535,000.00
5	Kab. Mempawah	23,651	2,246,845,000.00
6	Kab. Sambas	24,059	2,285,605,000.00
7	Kab. Sanggau	13,677	1,299,315,000.00
8	Kab. Sintang	10,995	1,044,525,000.00
9	Kota Pontianak	17,583	1,670,385,000.00
10	Kota Singkawang	19,911	1,891,545,000.00
11	Kab. Sekadau	3,002	285,190,000.00
12	Kab. Melawi	9,980	948,100,000.00
13	Kab. Kayong Utara	31,502	2,992,690,000.00
14	Kab. Kubu Raya	41,082	3,902,790,000.00
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	72,880	6,923,600,000.00
1	Kab. Barito Selatan	75,251	7,148,845,000.00
2	Kab. Barito Utara	63,756	6,056,820,000.00
3	Kab. Kapuas	57,488	5,461,360,000.00
4	Kab. Kotawaringin Barat	21,859	2,076,605,000.00
5	Kab. Kotawaringin Timur	102,418	9,729,710,000.00
6	Kota Palangkaraya	37,497	3,562,215,000.00
7	Kab. Katingan	80,357	7,633,915,000.00
8	Kab. Seruyan	23,717	2,253,115,000.00
9	Kab. Sukamara	30,311	2,879,545,000.00
10	Kab. Lamandau	3,108	295,260,000.00
11	Kab. Gunung Mas	11,326	1,075,970,000.00
12	Kab. Pulang Pisau	11,789	1,119,955,000.00
13	Kab. Murung Raya	72,088	6,848,360,000.00
14	Kab. Barito Timur	49,990	4,749,050,000.00
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	20,905	1,985,975,000.00
1	Kab. Banjar	29,385	2,791,575,000.00
2	Kab. Barito Kuala	31,194	2,963,430,000.00
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	116,584	11,075,480,000.00
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	120,261	11,424,795,000.00
5	Kab. Hulu Sungai Utara	108,178	10,276,910,000.00

6	Kab. Kotabaru	5,519	524,305,000.00
7	Kab. Tabalong	10,813	1,027,235,000.00
8	Kab. Tanah Laut	59,466	5,649,270,000.00
9	Kab. Tapin	11,502	1,092,690,000.00
10	Kota Banjarbaru	14,878	1,413,410,000.00
11	Kota Banjarmasin	13,764	1,307,580,000.00
12	Kab. Balangan	77,670	7,378,650,000.00
13	Kab. Tanah Bumbu	33,157	3,149,915,000.00
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
1	Kab. Berau	4,932	468,540,000.00
2	Kab. Kutai Kartanegara	96,843	9,200,085,000.00
3	Kab. Kutai Barat	66,589	6,325,955,000.00
4	Kab. Kutai Timur	5,877	558,315,000.00
5	Kab. Paser	16,718	1,588,210,000.00
6	Kota Balikpapan	15,578	1,479,910,000.00
7	Kota Bontang	50,285	4,777,075,000.00
8	Kota Samarinda	30,867	2,932,365,000.00
9	Kab. Penajam Paser Utara	57,750	5,486,250,000.00
10	Kab. Mahakam Ulu	23,675	2,249,125,000.00
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	61,431	5,835,945,000.00
1	Kab. Bolaang Mongondow	4,962	471,390,000.00
2	Kab. Minahasa	131,037	12,448,515,000.00
3	Kab. Kepulauan Sangihe	59,261	5,629,795,000.00
4	Kota Bitung	72,124	6,851,780,000.00
5	Kota Manado	109,983	10,448,385,000.00
6	Kab. Kepulauan Talaud	12,334	1,171,730,000.00
7	Kab. Minahasa Selatan	73,802	7,011,190,000.00
8	Kota Tomohon	25,256	2,399,320,000.00
9	Kab. Minahasa Utara	55,843	5,305,085,000.00
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	11,753	1,116,535,000.00
11	Kota Kotamobagu	34,703	3,296,785,000.00
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	21,927	2,083,065,000.00
13	Kab. Minahasa Tenggara	54,536	5,180,920,000.00
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	20,977	1,992,815,000.00
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	30,531	2,900,445,000.00
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	121,385	11,531,575,000.00
1	Kab. Banggai	111,680	10,609,600,000.00
2	Kab. Banggai Kepulauan	10,725	1,018,875,000.00
3	Kab. Buol	35,170	3,341,150,000.00
4	Kab. Toli-Toli	37,671	3,578,745,000.00
5	Kab. Donggala	54,792	5,205,240,000.00
6	Kab. Morowali	24,883	2,363,885,000.00
7	Kab. Poso	9,089	863,455,000.00
8	Kota Palu	40,395	3,837,525,000.00
9	Kab. Parigi Moutong	96,143	9,133,585,000.00
10	Kab. Tojo Una Una	26,698	2,536,310,000.00
11	Kab. Sigi	12,611	1,198,045,000.00
12	Kab. Banggai Laut	4,895	465,025,000.00
13	Kab. Morowali Utara	30,338	2,882,110,000.00
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-

1	Kab. Bantaeng	105,431	10,015,945,000.00
2	Kab. Barru	57,175	5,431,625,000.00
3	Kab. Bone	298,538	28,361,110,000.00
4	Kab. Bulukumba	81,333	7,726,635,000.00
5	Kab. Enrekang	62,854	5,971,130,000.00
6	Kab. Gowa	126,899	12,055,405,000.00
7	Kab. Jeneponto	100,793	9,575,335,000.00
8	Kab. Luwu	89,640	8,515,800,000.00
9	Kab. Luwu Utara	60,218	5,720,710,000.00
10	Kab. Maros	79,341	7,537,395,000.00
11	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	92,241	8,762,895,000.00
12	Kota Palopo	81,429	7,735,755,000.00
13	Kab. Luwu Timur	165,079	15,682,505,000.00
14	Kab. Pinrang	54,488	5,176,360,000.00
15	Kab. Sinjai	138,785	13,184,575,000.00
16	Kab. Kepulauan Selayar	60,676	5,764,220,000.00
17	Kab. Sidenreng Rappang	14,013	1,331,235,000.00
18	Kab. Soppeng	116,639	11,080,705,000.00
19	Kab. Takalar	99,865	9,487,175,000.00
20	Kab. Tana Toraja	53,916	5,122,020,000.00
21	Kab. Wajo	60,121	5,711,495,000.00
22	Kota Pare-pare	60,342	5,732,490,000.00
23	Kota Makassar	171,404	16,283,380,000.00
24	Kab. Toraja Utara	82,744	7,860,680,000.00
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	37,099	3,524,405,000.00
1	Kab. Buton	46,781	4,444,195,000.00
2	Kab. Konawe	27,037	2,568,515,000.00
3	Kab. Kolaka	23,248	2,208,560,000.00
4	Kab. Muna	83,323	7,915,685,000.00
5	Kota Kendari	12,491	1,186,645,000.00
6	Kota Bau-bau	60,173	5,716,435,000.00
7	Kab. Konawe Selatan	13,913	1,321,735,000.00
8	Kab. Bombana	36,708	3,487,260,000.00
9	Kab. Wakatobi	48,041	4,563,895,000.00
10	Kab. Kolaka Utara	3,392	322,240,000.00
11	Kab. Konawe Utara	27,727	2,634,065,000.00
12	Kab. Buton Utara	20,347	1,932,965,000.00
13	Kab. Konawe Kepulauan	6,783	644,385,000.00
14	Kab. Kolaka Timur	14,998	1,424,810,000.00
15	Kab. Muna Barat	31,342	2,977,490,000.00
16	Kab. Buton Tengah	19,997	1,899,715,000.00
17	Kab. Buton Selatan	40,026	3,802,470,000.00
XXII	Provinsi Bali	-	-
1	Kab. Badung	267,631	25,424,945,000.00
2	Kab. Bangli	122,125	11,601,875,000.00
3	Kab. Buleleng	314,053	29,835,035,000.00
4	Kab. Gianyar	13,197	1,253,715,000.00
5	Kab. Jembrana	184,208	17,499,760,000.00
6	Kab. Karangasem	253,268	24,060,460,000.00
7	Kab. Klungkung	107,956	10,255,820,000.00
8	Kab. Tabanan	117,616	11,173,520,000.00
9	Kota Denpasar	69,266	6,580,270,000.00

XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	104,796	9,955,620,000.00
1	Kab. Bima	32,630	3,099,850,000.00
2	Kab. Dompu	49,779	4,729,005,000.00
3	Kab. Lombok Barat	13,445	1,277,275,000.00
4	Kab. Lombok Tengah	34,179	3,247,005,000.00
5	Kab. Lombok Timur	41,867	3,977,365,000.00
6	Kab. Sumbawa	83,312	7,914,640,000.00
7	Kota Mataram	17,079	1,622,505,000.00
8	Kota Bima	35,300	3,353,500,000.00
9	Kab. Sumbawa Barat	58,231	5,531,945,000.00
10	Kab. Lombok Utara	9,963	946,485,000.00
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	40,894	3,884,930,000.00
1	Kab. Alor	44,434	4,221,230,000.00
2	Kab. Belu	14,415	1,369,425,000.00
3	Kab. Ende	14,251	1,353,845,000.00
4	Kab. Flores Timur	47,999	4,559,905,000.00
5	Kab. Kupang	22,551	2,142,345,000.00
6	Kab. Lembata	40,433	3,841,135,000.00
7	Kab. Manggarai	23,639	2,245,705,000.00
8	Kab. Ngada	5,358	509,010,000.00
9	Kab. Sikka	78,030	7,412,850,000.00
10	Kab. Sumba Barat	31,884	3,028,980,000.00
11	Kab. Sumba Timur	41,460	3,938,700,000.00
12	Kab. Timor Tengah Selatan	8,884	843,980,000.00
13	Kab. Timor Tengah Utara	2,968	281,960,000.00
14	Kota Kupang	10,678	1,014,410,000.00
15	Kab. Rote Ndao	8,208	779,760,000.00
16	Kab. Manggarai Barat	21,936	2,083,920,000.00
17	Kab. Nagekeo	21,409	2,033,855,000.00
18	Kab. Sumba Barat Daya	43,562	4,138,390,000.00
19	Kab. Sumba Tengah	23,205	2,204,475,000.00
20	Kab. Manggarai Timur	11,071	1,051,745,000.00
21	Kab. Sabu Raijua	22,044	2,094,180,000.00
22	Kab. Malaka	-	-
XXV	Provinsi Maluku	18,408	1,748,760,000.00
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	29,814	2,832,330,000.00
2	Kab. Maluku Tengah	16,234	1,542,230,000.00
3	Kab. Maluku Tenggara	7,625	724,375,000.00
4	Kab. Buru	10,710	1,017,450,000.00
5	Kota Ambon	9,296	883,120,000.00
6	Kab. Seram Bagian Barat	20,789	1,974,955,000.00
7	Kab. Seram Bagian Timur	19,621	1,863,995,000.00
8	Kab. Kepulauan Aru	26,806	2,546,570,000.00
9	Kota Tual	21,989	2,088,955,000.00
10	Kab. Maluku Barat Daya	18,301	1,738,595,000.00
11	Kab. Buru Selatan	16,131	1,532,445,000.00
XXVI	Provinsi Papua	-	-
1	Kab. Biak Numfor	947	89,965,000.00
2	Kab. Jayapura	7,876	748,220,000.00
3	Kab. Jayawijaya	20,019	1,901,805,000.00
4	Kab. Merauke	14,408	1,368,760,000.00
5	Kab. Mimika	26,842	2,549,990,000.00

6	Kab. Nabire	10,268	975,460,000.00
7	Kab. Paniai	1,210	114,950,000.00
8	Kab. Puncak Jaya	12,000	1,140,000,000.00
9	Kab. Kepulauan Yapen	2,997	284,715,000.00
10	Kota Jayapura	4,426	420,470,000.00
11	Kab. Sarmi	688	65,360,000.00
12	Kab. Keerom	6,838	649,610,000.00
13	Kab. Yahukimo	-	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	10,005	950,475,000.00
15	Kab. Tolikara	-	-
16	Kab. Boven Digoel	5,005	475,475,000.00
17	Kab. Mappi	14,668	1,393,460,000.00
18	Kab. Asmat	-	-
19	Kab. Waropen	2,117	201,115,000.00
20	Kab. Supiori	1,434	136,230,000.00
21	Kab. Mamberamo Raya	7,242	687,990,000.00
22	Kab. Mamberamo Tengah	5,241	497,895,000.00
23	Kab. Yalimo	4,999	474,905,000.00
24	Kab. Lanny Jaya	24,972	2,372,340,000.00
25	Kab. Nduga	6,440	611,800,000.00
26	Kab. Dogiyai	2,300	218,500,000.00
27	Kab. Puncak	9,994	949,430,000.00
28	Kab. Intan Jaya	2,497	237,215,000.00
29	Kab. Deiyai	896	85,120,000.00
XXVII	Provinsi Maluku Utara	24,472	2,324,840,000.00
1	Kab. Halmahera Tengah	18,494	1,756,930,000.00
2	Kota Ternate	12,676	1,204,220,000.00
3	Kab. Halmahera Barat	12,715	1,207,925,000.00
4	Kab. Halmahera Timur	16,392	1,557,240,000.00
5	Kab. Halmahera Selatan	11,989	1,138,955,000.00
6	Kab. Halmahera Utara	72,159	6,855,105,000.00
7	Kab. Kepulauan Sula	9,804	931,380,000.00
8	Kota Tidore Kepulauan	8,737	830,015,000.00
9	Kab. Pulau Morotai	43,197	4,103,715,000.00
10	Kab. Pulau Taliabu	5,185	492,575,000.00
XXVIII	Provinsi Banten	702,231	66,711,945,000.00
1	Kab. Lebak	74,022	7,032,090,000.00
2	Kab. Pandeglang	29,230	2,776,850,000.00
3	Kab. Serang	33,792	3,210,240,000.00
4	Kab. Tangerang	79,412	7,544,140,000.00
5	Kota Cilegon	28,214	2,680,330,000.00
6	Kota Tangerang	356,398	33,857,810,000.00
7	Kota Serang	39,024	3,707,280,000.00
8	Kota Tangerang Selatan	478,697	45,476,215,000.00
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	53,679	5,099,505,000.00
1	Kab. Bangka	14,823	1,408,185,000.00
2	Kab. Belitung	60,673	5,763,935,000.00
3	Kota Pangkal Pinang	19,162	1,820,390,000.00
4	Kab. Bangka Selatan	22,292	2,117,740,000.00
5	Kab. Bangka Tengah	23,560	2,238,200,000.00
6	Kab. Bangka Barat	13,602	1,292,190,000.00
7	Kab. Belitung Timur	50,174	4,766,530,000.00

XXX	Provinsi Gorontalo	181,177	17,211,815,000.00
1	Kab. Boalemo	27,818	2,642,710,000.00
2	Kab. Gorontalo	36,663	3,482,985,000.00
3	Kota Gorontalo	33,867	3,217,365,000.00
4	Kab. Pohuwato	30,883	2,933,885,000.00
5	Kab. Bone Bolango	26,709	2,537,355,000.00
6	Kab. Gorontalo Utara	30,480	2,895,600,000.00
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	-
1	Kab. Natuna	49,472	4,699,840,000.00
2	Kab. Kepulauan Anambas	27,822	2,643,090,000.00
3	Kab. Karimun	32,347	3,072,965,000.00
4	Kota Batam	38,111	3,620,545,000.00
5	Kota Tanjung Pinang	19,500	1,852,500,000.00
6	Kab. Lingga	39,091	3,713,645,000.00
7	Kab. Bintan	17,848	1,695,560,000.00
XXXII	Provinsi Papua Barat	74,764	7,102,580,000.00
1	Kab. Fak Fak	15,502	1,472,690,000.00
2	Kab. Manokwari	9,973	947,435,000.00
3	Kab. Sorong	9,242	877,990,000.00
4	Kota Sorong	15,222	1,446,090,000.00
5	Kab. Raja Ampat	27,793	2,640,335,000.00
6	Kab. Sorong Selatan	8,952	850,440,000.00
7	Kab. Teluk Bintuni	9,363	889,485,000.00
8	Kab. Teluk Wondama	10,038	953,610,000.00
9	Kab. Kaimana	7,874	748,030,000.00
10	Kab. Maybrat	7,596	721,620,000.00
11	Kab. Tambrauw	14,140	1,343,300,000.00
12	Kab. Manokwari Selatan	5,112	485,640,000.00
13	Kab. Pegunungan Arfak	2,547	241,965,000.00
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
1	Kab. Majene	58,834	5,589,230,000.00
2	Kab. Mamuju	100,673	9,563,935,000.00
3	Kab. Polewali Mandar	63,791	6,060,145,000.00
4	Kab. Mamasa	34,557	3,282,915,000.00
5	Kab. Pasangkayu	37,364	3,549,580,000.00
6	Kab. Mamuju Tengah	47,360	4,499,200,000.00
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	37,449	3,557,655,000.00
1	Kab. Bulungan	32,967	3,131,865,000.00
2	Kab. Malinau	34,843	3,310,085,000.00
3	Kab. Nunukan	27,613	2,623,235,000.00
4	Kota Tarakan	10,250	973,750,000.00
5	Kab. Tana Tidung	8,168	775,960,000.00
	Jumlah Alokasi Nasional	35,183,200	3,342,404,000,000.00
	Cadangan penambahan jumlah kepesertaan		157,596,000,000.00
	Grand Total		3,500,000,000,000.00

6

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

**A. FORMAT SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN SELISIH
PERUBAHAN IURAN**

KOP SURAT
BPJS KESEHATAN

SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: (1) Tanggal.. .. (2)

Yth. KPA BUN Transfer Dana Perimbangan

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen

Satker(3).....

Direktorat Dana Perimbangan

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, bersama ini kami mengajukan tagihan/permintaan pembayaran sebagai berikut:

- I. Dasar Pembayaran : Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-.... (4)
.... Tanggal.. .. (5) tentang (6)
- II. Tahun Anggaran : ... (7)
- III. Rincian Penerima
 1. Jumlah Uang : 1. sebesar Rp..... (8)
2. Selisih kurang sebesar Rp....(9)....
 2. Uraian : Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan
Pembayaran Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah/selisih kurang DAU
Tambahan Bantuan Selisih Perubahan
Iuran
 3. Nama Penerima : (10)
 4. Alamat Penerima : (11)
 5. NPWP : (12)

Jumlah tagihan tersebut agar ditransfer ke rekening:

1. Nama Rekening :...(13).
2. Nomor Rekening :....(14).
3. Nama Bank : ...(15)....

IV. Lampiran

1. Kuitansi/Bukti Pembayaran / selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran *) ; dan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

...(16)...,(17).....
Direktur/Pejabat yang berwenang

.....(18).....
.....(19).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan nomor penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran
2.	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran
3.	Diisi dengan nama satker
4.	Diisi dengan nomor PMK ini
5.	Diisi dengan tanggal PMK ini
6.	Diisi dengan perihal PMK ini
7.	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
8.	Diisi dengan jumlah tagihan (dalam angka dan huruf)
9.	Diisi dengan jumlah tagihan untuk selisih kurang (dalam angka dan huruf)
10.	Diisi dengan nama pejabat penerima
11.	Diisi dengan alamat penerima
12.	Diisi dengan nomor NPWP penerima
13.	Diisi dengan nama rekening milik penerima sesuai data bank/rekening koran
14.	Diisi dengan nomor rekening milik penerima sesuai data bank/rekening koran
15.	Diisi dengan nama bank tempat penerima membuka rekening
16.	Diisi dengan tempat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
17.	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat tagihan dibuat dan ditandatangani
18.	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan dibubuhi cap dinas
19.	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan surat tagihan

B. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran : ...(1)...

Nomor Bukti : ...(2)...

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker ...(3)....

Jumlah Uang : Rp (4)

Terbilang : (5)

Untuk Pembayaran : Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah/selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran (6) ...

..... (7) , (8)

Jabatan Penerima Uang

..... (9)

..... (10)

Menyetujui

a.n. KPA BUN Transfer Dana Perimbangan

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (11)

..... (12)

NIP (13).....

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI /BUKTI PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan
2.	Diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembukuan
3.	Diisi dengan nama satker
4.	Diisi dengan jumlah tagihan dengan angka
5.	Diisi dengan jumlah tagihan dengan huruf
6.	Diisi sesuai dengan surat tagihan/permintaan pembayaran yakni: - untuk pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, atau - selisih kurang DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran
7.	Diisi dengan tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani
8.	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat kuitansi dibuat dan di tandatangi
9.	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang di atas meterai se besar Rp6000,-(enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap dinas
10.	Diisi dengan nama pejabat penerima uang
11.	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas
12.	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
13.	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT
BPJS KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang telah kami sampaikan pada tanggal(4).... ke DJPK merupakan data jumlah kepesertaan yang sudah kami rekonsiliasi dengan seluruh Pemerintah Daerah;
2. Atas Penyetoran Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: (5), tanggal..... (6), sejumlah Rp. (7) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas penyetoran Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dibandingkan dengan hasil perhitungan selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, kami bersedia untuk menyetor selisih lebih dimaksud ke Kas Negara; dan
4. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,

..... (8)

BPJS Kesehatan

.....(9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN SPTJM

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nomor urut SPTJM
2.	Diisi nama lengkap pembuat SPTJM
3.	Diisi jabatan pembuat SPTJM
4.	Diisi tanggal penyampaian data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bulan Agustus-Desember 2019 ke DJPK
5.	Diisi nomor kuitansi berkeñaan
6.	Diisi tanggal kuitansi berkeñaan
7.	Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkeñaan
8.	Diisi tanggal penerbitan SPTJM
9.	Diisi jabatan penandatanganan SPTJM
10.	Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
11.	Diisi nama lengkap penandatanganan SPTJM
12.	Diisi nomor pegawai penandatanganan SPTJM

D. LAMPIRAN PENYAMPAIAN KEPESERTAAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

LAPORAN KEPESERTAAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
UNTUK BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

No.	Nama Daerah	Baseline	Agustus	Selisih perubahan Agustus	September	Selisih perubahan September	Oktober	Selisih perubahan Oktober	November	Selisih perubahan November	Desember	Selisih perubahan Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Provinsi											
	Kab/Kota											
	Kab/Kota											
	Jumlah											

Jakarta,(14)

BPJS Kesehatan

.....(15)

.....(16)

.....(17)

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN PENYAMPAIAN KEPESERTAAN
PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK
BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi nomor secara urut
2.	Diisi nama pemerintah daerah
3.	Diisi jumlah peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menurut Lampiran I PMK ini
4.	Diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir bulan Agustus 2019
5.	Diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari data pada tanggal 1 Agustus 2019.
6.	Diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir bulan September 2019
7.	Diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari data akhir bulan Agustus 2019
8.	Diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir bulan Oktober 2019
9.	Diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari data akhir bulan September 2019
10.	Diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir bulan November 2019
11.	Diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari data akhir bulan Oktober 2019
12.	Diisi jumlah realisasi peserta jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan laporan ini dibuat
13.	Diisi jumlah selisih kenaikan jumlah peserta kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari data akhir bulan November 2019

14.	Diisi tanggal pembuatan laporan ini
15.	Diisi jabatan penandatanganan laporan ini
16.	Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan
17.	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan ini
18.	Diisi nomor pegawai penandatanganan laporan ini

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001